

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengantar

Ada kesejajaran problematika hubungan antara negara, korporasi dan komunitas lokal. Konteks lokal akan memberikan bentuk dan pola berbeda terhadap hubungan tripolar. Studi terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya sangat membantu proses penentuan aspek-aspek utama yang berhubungan dengan persoalan tambang di Manggarai, yang menjadi konteks penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan model hubungan tripolar antara negara, korporasi dan komunitas lokal. Resistensi merupakan koreksi terhadap kecenderungan terjadinya hubungan yang timpang terutama dalam kerangka dominasi negara dan korporasi atas komunitas lokal. Konsep resistensi, negara, korporasi dan komunitas lokal menjadi simpul-simpul penting yang merangkai keseluruhan proses penelitian ini.

2.2 Tinjauan Pustaka

Beberapa kesimpulan yang dapat ditemukan dari penelitian-penelitian penting ini adalah:

- o Studi **Prayogo**¹ menyimpulkan dimensi-dimensi penting konflik antara korporasi dan komunitas lokal yaitu dinamika konflik, sebab konflik dan resolusi konflik. Hal yang penting juga dalam studi ini adalah pentingnya peran negara dalam mengatur hubungan korporasi dan komunitas lokal sebagai bagian dari proses resolusi konflik.
- o Studi **Sangaji**² menyimpulkan adanya relasi yang tidak seimbang antara korporasi dan masyarakat. Relasi asimetris ini mengakibatkan kehancuran masif pada komunitas lokal. Kehancuran komunitas lokal nampak pada runtuhnya keseimbangan ekologis yang seharusnya menopang keberadaan

¹ Dody Prayogo.(2008). *Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal (Sebuah Kasus Empirik pada Industri Geotermal di Jawa Barat*. Depok: Fisip UI Press.

² Arianto Sangaji.(2002). *Buruk INCO, Rakyat Digusur: Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.

komunitas. Ekologi atau lingkungan yang seharusnya menjadi sumber penghidupan komunitas lokal mengalami kemunduran. Ada beberapa temuan dan kesimpulan penting yang dikemukakan dalam kajian ini. *Pertama*, problematika keadilan menjadi fokus dan isu yang harus diperhatikan dalam membangun hubungan antara korporasi dan komunitas lokal. Operasi koperasi tambang harus memperhatikan struktur dan kultur komunitas lokal yang merujuk pada wilayah tempat operasi korporasi itu dilaksanakan. *Kedua*, persoalan paling menonjol yang dialami komunitas lokal tidak hanya berkaitan dengan rusaknya lingkungan kehidupan mereka melainkan kehancuran kompleks yang dialami masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. *Ketiga*, lembaga yang menjamin sistem regulasi yang kuat untuk mengatur korporasi tambang ternyata tidak memiliki kekuatan berhadapan dengan dominasi korporasi tambang.

- Kajian **Sinclair**³ menyebutkan adanya kenyataan bahwa operasi tambang menimbulkan jarak ekonomis antara korporasi dan masyarakat yang berada dalam jangkauan operasi tambang. Jarak ekonomis ini terutama berhubungan dengan kemiskinan dan kemelaratan yang dialami komunitas lokal akibat ekstensifikasi korporasi tambang tanpa memperhitungkan keberadaan komunitas dengan segala karakter yang ada di dalamnya. Ada beberapa temuan penting yang dihasilkan kajian ini. *Pertama*, langkah-langkah yang ditempuh masyarakat pribumi untuk mencapai titik kekuatan mengontrol korporasi dengan mekanisme investasi yang dilakukan di area tambang yang melibatkan masyarakat pribumi sekitar tambang. *Kedua*, Kajian ini juga berhasil menemukan konsep dan strategi masyarakat pribumi untuk mendorong terciptanya korporasi tambang dengan perspektif etik yang kuat.
- Studi **Kaplan**⁴ bertitiktolak pada kenyataan hancurnya komunitas sosial di sekitar area pertambangan. Kehancuran lokal yang sangat serius telah menimbulkan satu kemerosotan lokal yang sistemik. Kajian ini berhasil memunculkan beberapa hal penting berikut ini. *Pertama*, kajian ini menyoroti

³Amanda Sinclair.(2003). Indigenous human resource practices in Australian Mining companies: Towards an ethical model in *Journal of Business Ethics*. Dordrecht. Vol. 45, Iss. 4

⁴Paul Kaplan.(2002). Mining, corporate social responsibility and the "community": The case of Rio Tinto, Richards Bay Minerals and the Mbonambi in *Journal of Business Ethics*. Dordrecht, Vol. 39, Iss. 3; pg. 275, 22 pgs

dan memunculkan komunitas lokal sebagai entitas yang penting dalam kaitannya dengan korporasi tambang. Sebagai tubuh organisasional komunitas memiliki beberapa aspek: kemerdekaan, kemandirian dan independensi. Aspek-aspek ini mencirikan komunitas lokal sebagai satu kekuatan yang bisa membangun relasi sejajar dengan korporasi. **Kedua**, Posisi ini akan memaksa korporasi untuk tidak hanya utamakan CSR dalam menjawab permasalahan yang ada di daerah pertambangan. Aspek-aspek ini akan menempatkan komunitas pada posisi sebagai subyek yang dapat menentukan sirkulasi kemakmuran di area pertambangan. Aspek-aspek ini juga dapat digunakan untuk menekan keberadaan korporasi tambang.

- Studi **Imbun**⁵ menyimpulkan perangkap kemiskinan yang dibangun korporasi tambang telah menjadi sumber kehancuran bagi masyarakat atau komunitas lokal di kawasan pertambangan. Kajian ini menemukan satu persoalan penting bahwa CSR sebagai pembelajaran sosial dan pertanggungjawaban sosial organisasional korporasi hanya menjadi mekanisme yang dijadikan korporasi untuk meredam aksi dan perlawanan sosial komunitas terhadap korporasi tambang. CSR dianggap korporasi bisa menyelesaikan semua persoalan yang muncul akibat adanya tambang di kawasan di mana komunitas lokal memperoleh banyak nilai bagi kehidupan mereka. CSR-oriented yang dianut korporasi menyebabkan mereka kehilangan solusi alternatif ketika komunitas lokal menunjukkan resistensi kuat terhadap kehadiran korporasi.
- **White**⁶ menemukan kemakmuran sebagai isu utama yang dimunculkan dalam kajian ini. Seberapa efektif korporasi menumbuhkan kesejahteraan pada komunitas lokal menjadi orientasi studi dan kajian. Kondisi terpuruk komunitas lokal yang nampak dalam kemiskinan dan kesengsaraan menunjukkan ketiadaan format perlindungan dan kehendak baik dari korporasi terhadap keberlangsungan hidup komunitas lokal. Kajian ini mengemukakan sebab-sebab terjadinya perlawanan sosial dan resistensi lokal

⁵Benedict Imbun Young.(2007). Cannot Manage without The 'Significant Other': Mining, Corporate Social Responsibility and Local Communities in Papua New Guinea in *Journal of Business Ethics* pp. 73:177-192

⁶Lane White.(2006). The Challenges of Prosperity in *Engineering and Mining Journal*; pp. 8; ProQuest Science Journals pg. 26

terhadap korporasi tambang. Komunitas membangun konsolidasi internal untuk melawan ekspansi korporasi terhadap sumber daya yang merujuk pada kepemilikan komunitas lokal

- Kajian **Jenkins**⁷ menegaskan bahwa komunitas lokal gagal membangun pemahaman bersama terhadap korporasi tambang. Elemen-elemen yang membentuk komunitas lokal sebagai satu entitas utuh yang memiliki posisi sama kuat dengan korporasi dan regulator tidak mampu membangun dan menunjukkan perspektif yang sama untuk menilai dan mengevaluasi korporasi tambang. Sebagian dari komunitas lokal yang terkooptasi pada mekanisme korporasi menyebabkan gagalnya proses negosiasi komunitas lokal mendapatkan “hak-hak” ekonomi, sosial dan politik atas sumber daya yang dieksploitasi korporasi. Kajian ini menemukan kapasitas komunitas lokal dalam konteks resolusi konflik. Negosiasi mengandaikan aspek-aspek penting seperti point yang perlu dinegosiasikan, alat-alat atau subyek negosiasi, pelaku negosiasi, titik awal negosiasi.
- Studi **Lee**⁸ menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan persoalan utama yang menjadi latar belakang kajian ini. Korporasi tidak memperhatikan aspek-aspek penting berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan untuk generasi sosial yang ada di sekitar kawasan tambang. Kekalahan komunitas lokal tercermin pada kenyataan degradasi lingkungan yang diakibatkan perluasan eksploitasi korporasi. Kajian ini menemukan perluasan cara pandang terhadap persoalan lingkungan. Aspek-aspek sosial dan budaya semestinya menjadi bagian penting dari telaahan terhadap persoalan lingkungan. Aspek-aspek sosial dan budaya menjadi hal penting untuk dimasukkan ke dalam strategi negosiasi komunitas lokal terhadap korporasi.

⁷ J. Craig Jenkins & Doug Bond. (2001). Conflict-Carrying Capacity, Political Crisis, and Reconstruction: A Framework for the Early Warning of Political System Vulnerability in *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 45, No. 1 (Feb., 2001), pp. 3-31 Published by: Sage Publications, Inc.

⁸ Lee, Charles. (2002). Environmental Justice: Building a Unified Vision of Health and the Environment in *Environmental Health Perspectives*, Vol. 110, Supplement 2: Community, Research, and Environmental Justice. pp. 141-144 Published by: The National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) Stable URL: <http://www.jstor.org>

- Kajian **Armitage**⁹ memperhatikan proses perubahan yang terjadi pada komunitas sosial yang mempunyai hubungan dengan korporasi. Perubahan sosial ini akan mempengaruhi cara pandang komunitas terhadap korporasi. Dinamika sosial ini berkaitan dengan perubahan kesadaran di lingkungan komunitas sosial juga berhubungan dengan sikap-sikap mereka dalam menentang atau memberikan koreksi terhadap korporasi. Kajian ini menemukan korelasi antara politik pembangunan yang beroperasi di tingkat lokal dengan menggunakan korporasi sebagai instrumen utama yang berhubungan langsung dengan komunitas lokal. Dampak-dampak destruktif yang muncul dari operasi korporasi ini pada akhirnya berkaitan dengan keberlangsungan sosial komunitas. Pada pihak lain, dinamika sosial berkaitan dengan perkembangan kesadaran komunitas sosial berkaitan dengan kehadiran korporasi yang menjalankan operasi mereka secara masif di kawasan yang merujuk pada keberadaan dan hak komunitas lokal. Locus Kajian ini relevan dengan penelitian tesis yang saya tulis. Pembangunan nasional Indonesia yang bergerak di tingkat lokal (Setting Sulawesi) merupakan contoh yang tepat untuk melihat bagaimana dinamika sosial komunitas lokal semestinya bisa memberikan sebuah tawaran alternatif bagaimana konsep pembangunan disusun dan bagaimana politik pembangunan dikerjakan dengan lebih baik berdasarkan konteks dan kebutuhan lokal. Komunitas lokal dengan kekayaan dinamikanya tidak hanya alat yang menyediakan sumber daya tetapi mempengaruhi keseluruhan pembangunan.
- Analisis **Nadkarni**¹⁰ bertolak dari kerangka pesimistik terhadap komunitas lokal. Kemunduran komunitas lokal berkaitan dengan daya hidup yang merosot akibat pola pendekatan pembangunan yang tidak lagi menempatkan lingkungan sebagai basis kehidupan komunitas melainkan aspek yang bisa mempercepat proses pembangunan meskipun menghasilkan kehancuran pada

⁹Derek Armitage. (2004). Nature: Society Dynamics, Policy Narratives, and Ecosystem Management: Integrating Perspectives on Upland Change and Complexity in Central Sulawesi, Indonesia in *Ecosystems*, Vol. 7, No. 7, pp. 717-728 Published by: Springer [Stable URL: http://www.jstor.org](http://www.jstor.org)

¹⁰MV Nadkarni.(2000). Poverty, Environment, Development: A Many-Patterned Nexus in *Economic and Political Weekly*, Vol. 35, No. 14, pp. 1184-1190 Published by: Economic and Political Weekly [Stable URL: http://www.jstor.org](http://www.jstor.org)

komunitas lokal. - Pembangunan mengakibatkan kemiskinan dan ketidakseimbangan sosial pada komunitas lokal. Kemiskinan merupakan gambaran proses pembangunan yang mengutamakan dan memutlakan pertimbangan ekonomi.

- o Studi yang dilakukan **Evans., et. al**¹¹ menyimpulkan bahwa posisi subordinatif komunitas terhadap keberadaan dan kehadiran korporasi tambang dalam multi-aspek karakter dan mekanismenya. Kajian-kajian yang dituangkan dalam buku ini memunculkan beberapa persoalan pokok. 1). Munculnya dominasi korporasi yang menghegemoni komunitas dan pemerintah. Keberadaan korporasi membuat tidak berdaya baik negara maupun komunitas berhadapan dengan korporasi. 2). Korporasi tambang tidak memiliki akuntabilitas sosial yang kuat terhadap komunitas. Daya jangkauan korporasi tambang yang sangat luas membuat keberadaan dan kehadirannya bisa melumpuhkan komunitas dan pemerintah. 3). Tidak adanya format pengaturan (regulasi) yang cukup sesuai untuk memetakan posisi dan hubungan antara korporasi dan komunitas. 1). “Self-determination” pada komunitas lokal merupakan salah satu isu utama yang dikemukakan dalam buku ini. Komunitas lokal mempunyai kekuatan dan kedaulatan sosial ekologis untuk mengatur diri mereka sendiri termasuk posisinya dalam relasi dengan korporasi tambang. Kedaulatan lokal merupakan salah satu persoalan penting yang harus dimiliki komunitas agar dapat membangun sistematisa negosiasi dengan korporasi dan pemerintah.

Dari paparan studi di atas, terdapat beberapa temuan yang sangat relevan dan signifikan bagi penelitian ini. **Pertama**, relasi tripolar ini umumnya dikaji berdasarkan studi kasus. Kasus-kasus konflik pertambangan memunculkan karakter yang berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya berdasarkan kondisi sosial dan budaya yang ada pada locus pertambangan. **Kedua**, tiga kekuatan ini bertolak dari masing-masing titik berangkat dengan dasar argumentasi yang berbeda. Negara berkaitan dengan persoalan legalitas. Korporasi berhubungan dengan aspek profit. Komunitas lokal berkaitan dengan aspek kedaulatan. Perbedaan titik tolak ini ini

¹¹ Geoff Evans, et. al. (2001). *Moving Mountains: Communities Confront Mining and Globalisation*, Australia: Mineral Policy Institute.

memicu munculnya konflik yang terjadi dalam relasinya. *Ketiga*, kesempatan yang sama justru menimbulkan ketimpangan relasi ketiga kekuatan ini. Modal, teknologi dan hak regulatif negara seringkali memperkuat ketidakseimbangan relasi tripolar ini. *Keempat*, lokal memiliki aspek-aspek yang menentukan profil konflik di lingkungan pertambangan. Aspek-aspek ini menentukan bagaimana komunitas lokal membangun resistensi terhadap korporasi dan negara. *Kelima*, karakter yang khas pada komunitas lokal akan menentukan bagaimana transformasi hubungan tripolar ini berjalan. Apakah teori sosiologi pembangunan yang bertolak dari perspektif hubungan tripolar ini mencukupi untuk menjelaskan problematika yang terjadi di level komunitas lokal atau tidak.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Hubungan Tripolar

Pembangunan menjadi salah satu persoalan yang banyak diulas dewasa ini. Salah satu tema penting yang dibahas dalam kaitannya dengan tema ini adalah relasi kekuatan yang memiliki peran signifikan dalam proses pembangunan. Ada banyak jawaban yang coba dikemukakan dengan memunculkan teori dan pendekatan pembangunan yang dianggap bisa memberikan solusi alternatif.

Konteks pembangunan juga sudah bergeser dari pusat-pusat ekonomi dan politik menuju komunitas lokal yang memiliki karakter khusus. Maka, salah satu jawaban yang coba diajukan adalah memberikan tempat untuk peran komunitas lokal (daerah) dalam proses pembangunan. Namun, pembangunan yang merujuk pada keberadaan komunitas lokal (daerah) menimbulkan banyak implikasi dan efek yang pada akhirnya justru tidak menguntungkan keberadaan komunitas lokal.

Kemunduran, kemerosotan lingkungan dan hancurnya keseluruhan keseimbangan kehidupan merupakan muara dari praktek pembangunan ini.¹² Bertolak dari refleksi ini dapat dikatakan bahwa sepanjang hampir dua dekade terakhir, relasi yang tidak seimbang antara semua kekuatan yang menentukan arah

¹²Bruce Rich, satu dekade lalu, menulis buku *Mortgaging The Earth: The World Bank, Environmental Impoverishment and The Crisis of Development*. INFID, tahun 1999, menerjemahkan dan menerbitkan buku ini, dengan judul *Menggadaikan Bumi: Bank Dunia, Penghancuran Lingkungan dan Krisis Pembangunan*.

pembangunan global, regional dan lokal memunculkan banyak persoalan negatif dan destruktif.

Sistem yang bekerja di dalamnya telah menghancurkan bumi dan kehidupan. Subjek, mekanisme, dan pola yang menggerakkan sistem pembangunan ini justru memperkuat proses objektifikasi terhadap lingkungan dan kehidupan sekedar sebagai basis ekonomi belaka.

Hubungan tripolar dalam konteks tambang di Manggarai, Flores, NTT dibangun di atas pertimbangan tiga poros kekuatan yaitu komunitas lokal (society), pemerintah (state) dan korporasi (market).¹³ Masing-masing kekuatan mempunyai landasan keberadaan yang berbeda. Studi ini bertolak dari analisis dinamika hubungan tiga kekuatan ini dengan menekankan resistensi yang dilakukan komunitas lokal.¹⁴ Resistensi bermaksud melembagakan koreksi komunitas lokal terhadap negara dan korporasi.

Dapat digambarkan di sini beberapa aspek pentingnya. **Pertama**, negara (pemerintah) harus menyelenggarakan kesejahteraan umum. Keberadaannya berdasarkan kekuasaan yang dilimpahkan secara sah padanya oleh masyarakat, melalui suatu proses demokratis. Lembaga publik ini mempunyai kuasa regulatif yang memungkinkan pengaturan dan koordinasi hidup bersama, misalnya wewenang untuk melarang korporasi melakukan eksploitasi sumber daya alam yang membahayakan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

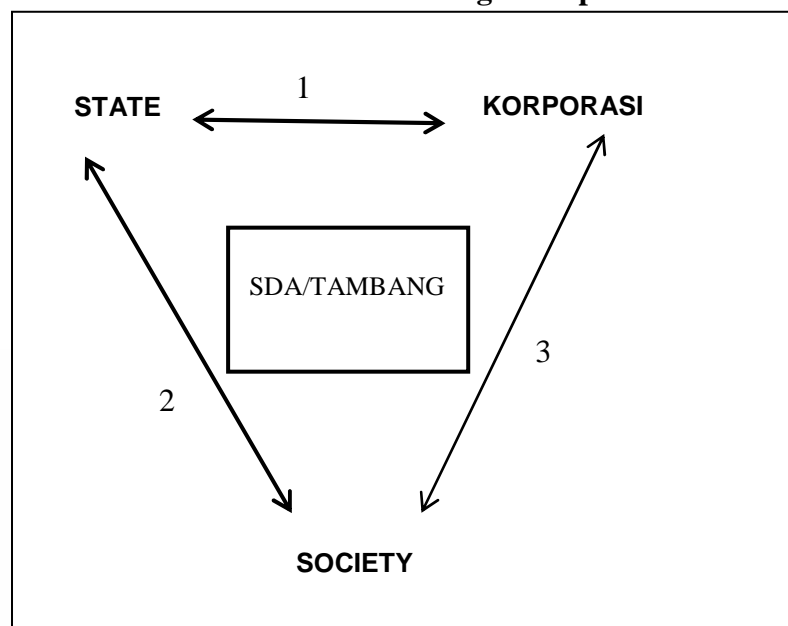
Kedua, pasar atau sektor bisnis bergerak di ruang publik melalui urusan transaksi jual-beli barang dan jasa secara spontan, namun “fair” demi keuntungan baik bagi penjual, pembeli, maupun masyarakat pada umumnya.

Ketiga, masyarakat warga berinteraksi di ruang publik atas dasar saling percaya dan tata perilaku sosial yang diandaikan diterima dan dihormati oleh semua pihak.

¹³Kerangka pemikiran ini dapat dilihat dengan lengkap dalam John Martinussen.1999. Society, State and the Market, A Guide to Completing Theories of Development, Zed Books, p. 221-232

¹⁴Dalam pembahasan selanjutnya, komunitas lokal mengacu pada Masyarakat Lingkar Tambang yang menghadapi persoalan multi-dimensi tambang secara langsung.

Gambar 2.1. Hubungan Tripolar Simetris

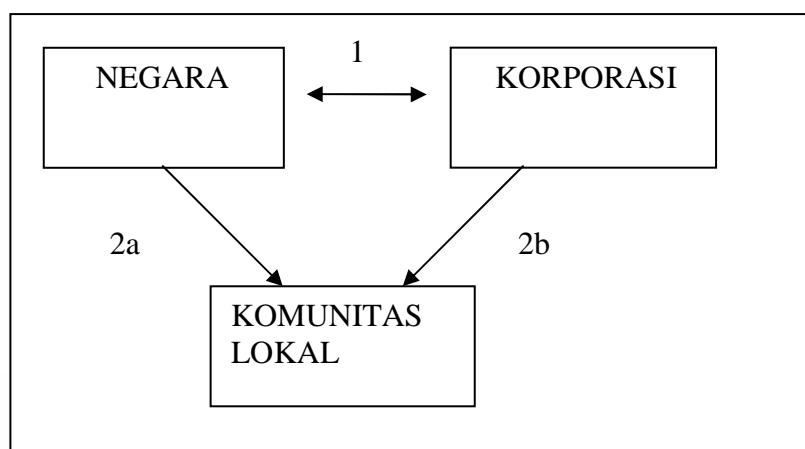


Ada hubungan yang seimbang antara ketiga elemen: negara, korporasi dan komunitas lokal (**Gambar 2.1**) Keseimbangan ini terjadi karena tingkat perbedaan kepentingan terhadap sumber daya masih rendah. Korporasi, negara dan komunitas bergerak secara seimbang sebagai tiga kekuatan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Namun, pendapat **Amartya Sen** penting untuk dijadikan sebagai acuan untuk melihat perubahan hubungan antara ketiga elemen ini. Konflik dan dominasi terjadi akibat perbedaan kapasitas setiap elemen.¹⁵ Korporasi memiliki kesempatan yang sama dengan komunitas untuk terlibat dalam konteks kehidupan bersama. Namun, karena kapasitas yang dimiliki kedua kekuatan ini berbeda maka cara pandang keduanya terhadap satu substansi persoalan akan berbeda. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya dominasi antar elemen dalam hubungan tripolar (**Gambar 2.2**). Korporasi dan negara mendominasi komunitas lokal dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Korporasi dan negara memiliki kapasitas maupun yang berbeda dibandingkan dengan komunitas lokal.

¹⁵Gagasan ini penting ditempatkan dalam konteks hubungan tripolar ini untuk melihat dinamika pergeseran bentuk hubungan ketiganya. Lihat pemikiran Amartya Sen.(1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knof, pp. 111-120

Gambar 2.2. Hubungan Tripolar Asimetris



Polanyi dalam konteks dinamika asimetris ini menyebutkan bahwa putusnya hubungan antara operasi korporasi (modal) dengan kapasitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan konflik akibat dominasi kepentingan korporasi. Konsekuensi lainnya resistensi komunitas lokal akan menjadi bagian dari proses manajemen konflik.¹⁶ Hal ini mengakibatkan banyak persoalan muncul di ruang publik. Korporasi yang bergerak dengan logika keuntungan mendominasi hubungan tripolar ini.

Komunitas lokal terlibat dalam konflik baik dengan negara maupun korporasi ketika posisi komunitas yang mengacu pada hak pemilikan lokasi (area) tambang tidak bisa menjadi basis untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan sebagai pemilik lahan tambang. Kondisi semacam ini menimbulkan konflik dan pertentangan antara komunitas, negara dan korporasi.

Hal ini dikaitkan dengan kebutuhan untuk menciptakan sosok tambang yang memiliki nuansa sosial atau sesuai dengan kebutuhan dan kondisi komunitas lokal. Koslowski menekankan pentingnya konsep korporasi 'sosial' yaitu eksplorasi korporasi yang tetap mengutamakan pertimbangan-pertimbangan 'sosial' yang memang tidak sejalan dengan argumentasi '**profit**' dari korporasi.¹⁷

¹⁶ Lihat penjelasan lebih lengkap dari gagasan ini dalam Karl Polanyi. (2001). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press, pp. 26 - 30

¹⁷ Pertimbangan 'sosial' dalam konteks ini terutama berhubungan dengan kepentingan keberlangsungan komunitas lokal terutama dalam kawasan operasi korporasi. Peter kolowski.(1998). *The Social Market Economy: Theory and Ethics of Economic Order*. Berlin: Springer.

2.3.2. Resistensi

Dominasi menimbulkan perlawanan (resistensi) dari pihak 'subordinan'. Namun, resistensi tidak hanya bermakna negatif, melainkan memiliki nilai terutama untuk menggerakkan perubahan sosial terhadap beberapa persoalan vital yang berkaitan dengan kehidupan komunitas.

Resistensi yang diwujudkan dalam bentuk mobilisasi massa berguna untuk memproduksi mekanisme baru, berkaitan dengan distribusi keadilan. Dalam konteks politik, hal ini dapat mendorong proses pemerintahan yang lebih baik dalam konteks politik. Resistensi sosial dapat dinyatakan dengan mengorganisasikan grup-grup oposisi yang muncul dalam komunitas terhadap negara dan korporasi yang menunjukkan dominasi terhadap komunitas lokal.¹⁸

Resistensi merupakan cara yang dilakukan komunitas lokal terhadap perluasan ekonomi korporasi yang mengutamakan keuntungan. Studi yang dilakukan **Hill** menyebutkan bahwa resistensi komunitas merupakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan pembangunan.¹⁹

Scott menyimpulkan bahwa resistensi merupakan jawaban terhadap dua persoalan utama yaitu risiko lingkungan dan implikasi sosial dari pembangunan.²⁰ Korporasi maupun negara melakukan transformasi ekonomi yang merusak keseimbangan ekologis, kerusakan sosial dan degradasi ekonomi komunitas lokal.

Bates menyebutkan empat (4) hal penting berkaitan dengan resistensi komunitas lokal.²¹ **Pertama**, resistensi memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan lokal yang diperhadapkan dengan korporasi dan negara. **Kedua**, pencapaian (achievement) resistensi yang dilakukan komunitas lokal berhadapan dengan korporasi dan negara. **Ketiga**, resistensi dapat terwujud dalam pengorganisasi kekuatan komunitas lokal untuk mendorong dua hal di atas.

Berhadapan dengan korporasi, komunitas lokal melakukan resistensi terhadap empat (4) persoalan penting berikut yaitu: rencana yang ditetapkan korporasi, proyek

¹⁸Thomas F. Homer-Dixon. (1999). *Environment, Scarcity, and Violence*, New Jersey: Princeton University Press

¹⁹F. Hill. (1978). 'Experiments with Public Sector Peasantry: agricultural, Schemes and Class Formation in Africa', pp. 25-41

²⁰J. Scott. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday forms of Peasant Resistance*, Yale University Press: New Haven, ET

²¹R.H. Bates, (1983). *Essay in Rural Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 46-55

korporasi, luasnya area operasi korporasi dan implikasi sosial ekologis operasi korporasi.²²

Spittler menyimpulkan bahwa komunitas lokal membutuhkan strategi dalam kerangka resistensi. Hal ini berkaitan dengan pilihan-pilihan tindakan yang dapat diambil komunitas lokal. Strategi resistensi mengandaikan kehadiran subyek-subyek yang memiliki kapasitas untuk menyusun pola dan mekanisme resistensi.

Ada beberapa bentuk resistensi komunitas lokal. *Pertama*, ‘*silent disobedience*’, berupa bentuk ketidakpatuhan diam yang ditunjukkan terutama berkaitan dengan regulasi yang mengatur proses operasi korporasi. *Kedua*, protes langsung melalui tekanan dan kontrol publik ketika berhadapan dengan korporasi dan negara.

Resistensi sebagai mekanisme sosial komunitas lokal dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal utama.²³ *Pertama*, membangun kapasitas komunitas lokal sebagai satu keutuhan berhadapan dengan korporasi dan negara. *Kedua*, resistensi dapat ditampakkan melalui forum-forum yang dibentuk komunitas lokal. *Ketiga*, mengorganisasikan inisiatif komunitas lokal

2.3.3 Negara, Korporasi dan Komunitas Lokal

Pertama, negara sebagai kekuatan regulatif yang mengatur pengelolaan sumber daya alam muncul sebagai kekuatan yang melakukan pendekatan bernuansa kekerasan terhadap komunitas (society). Kekerasan negara berkaitan dengan pembelaan dan perlindungan juridis yang diberikan negara kepada korporasi. Perlindungan hukum ini menjadi pembenaran kekerasan terutama kepada komunitas lokal yang berkaitan dengan hak pemilikan atas sumber daya alam.²⁴

Kedua, Adams menyebutkan bahwa korporasi memiliki kekuasaan untuk menentukan seperti apa sumber daya alam dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan target ekonomi yang ditetapkan korporasi. Ekspansi modal yang dijalankan korporasi memberikan keleluasaan kepadanya untuk melakukan komodifikasi terhadap sumber

²²Lihat penjelasan lebih lengkap pada Laporan Tahunan dari Friends of The earth International (2007). Institusi yang mengkaji perubahan-perubahan drastis yang terjadi di negara-negara dunia ketiga terutama berkaitan dengan dinamika hubungan antara korporasi, negara dan komunitas lokal.

²³Lebih lengkap pembahasan dapat dilihat dalam Laporan Tahunan dari Institute for Research and Development (IRE), Yogyakarta, 2008

²⁴Lihat R.J. Johnston. (1989). *Environmental Problems: Nature, Economy and State*. New York: p. 58

daya yang memenuhi standar kepentingan korporasi bisnis. Korporasi diberikan fasilitas hukum untuk melakukan monopoli pengelolaan sumber daya alam.²⁵

Ketiga, Frynas²⁶ menyebut komunitas lokal sebagai kelompok yang 'tak bernama' (anonim) dalam konteks hubungan tripolar, negara, korporasi dan society. Akibatnya, komunitas lokal diperlakukan sebagai salah satu modal ekonomi yang dapat dimanfaatkan korporasi untuk memperbesar produksi ekonominya. Penghancuran pengetahuan lokal menjadi ujung dari mekanisme destruktif yang dilancarkan korporasi dan negara dalam kaitannya dengan operasi tambang. Rich menganjurkan pembangunan yang mampu merefleksikan kepentingan '*grassroot*'. Pembangunan yang berbasiskan pada kepentingan komunitas lokal.²⁷

Konsep resistensi digunakan sebagai salah satu aspek penting untuk menjelaskan dinamika hubungan antara negara, korporasi dan komunitas lokal. Resistensi lokal menjelaskan aspek-aspek penting berkaitan dengan negara, korporasi, komunitas lokal dan elemen-elemen lain yang muncul di sekitar persoalan tambang Manggarai.



²⁵W.M. Adams. (2001). *Green Development*. London&New York: Routledge, p.157

²⁶Lihat contoh studi yang dilakukan J.G. Frynas. (2000). *Oil in Nigeria: conflict and Ligitation between oil companies and village communities*. Hamburg: LIT.

²⁷Lihat Bruce Rich, (1994). *Mortgaging the Earth: the World Bank, Environment and the Crisis of Development*, London: World Bank, p. 273